

## AKUNTABILITAS KEUANGAN MELALUI OPTIMALISASI SISKEUDES DAN KECAKAPAN PENGELOLA KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BLANG MANGAT

Fakriah<sup>1</sup>, Lukman<sup>2</sup>, Halimatus Sa'diyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

Email: [fakriah@pnl.ac.id](mailto:fakriah@pnl.ac.id)

**Abstract**— This study aims to analyze the effect of optimizing the financial information system and village apparatus competency on financial accountability in managing village funds in Blang Mangat District, Lhokseumawe City. The study population includes village apparatus who are directly or indirectly involved in managing village finances, such as village heads, village secretaries, treasurers, village operators, heads of development affairs, and hamlet/RT heads. Sampling was carried out purposively based on the criteria of involvement in village financial management. The research variables include optimizing the financial information system (X1), village apparatus competency (X2), and financial accountability in managing village funds (Y). This study uses a quantitative descriptive approach with multiple linear regression analysis through the SPSS application. The classical assumption test shows that the data is normally distributed. The results of the partial analysis show that optimizing the financial information system and village apparatus competency have a positive and significant effect on financial accountability. Simultaneously, both independent variables have positive effect on the dependent variable. The determination test shows that the contribution of optimizing the financial information system and village apparatus competency to financial accountability is 11%, while the other 89% is influenced by other factors. These results indicate that the influence of independent variables on financial accountability is strong.

**Keywords**— Accountability, Siskeudes, Optimization, Village Finance

### I. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat atau daerah mengalokasikan sekian besar dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan dalam bentuk dana desa. Alokasi dana ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini telah beberapa kali mengalami perubahan, revisi terakhir melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016. Besarnya alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa. Pengalokasian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat desa. Dari Kajian sebelumnya tentang efek dana desa terhadap perekonomian masyarakat menunjukkan hasil masih beragam, baik positif maupun negatif. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa alokasi dana desa masih belum sepenuhnya mampu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa dengan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan desa [1]. Sebagai contoh, bahwa ditemukan alokasi dana desa berefek negatif terhadap perekonomian desa, sehingga diperlukan evaluasi dan kajian lebih mendalam di lokasi yang berbeda, yang dilakukan dengan pendekatan dan perspektif yang lebih beragam. Adanya faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dana desa diperlukan peninjauan lebih lanjut sehingga dapat memahami faktor-faktor tersebut terutama yang berkaitan dengan peran tata kelola, partisipasi masyarakat, dan pengawasan dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Artikel-artikel penelitian mengenai optimalisasi sistem informasi keuangan dalam pengelolaan dana desa sebagian besar berfokus pada aspek penyerapan dana. Hal ini terlihat dari

kesimpulan yang disajikan dalam jurnal-jurnal yang telah dianalisis. Penelitian oleh Sari [2] mengungkapkan bahwa masih terdapat keterbatasan pada aparatur desa dalam manajemen keuangan desa. Akan tetapi, daerah yang sistem informasi akuntansi optimal menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih baik. Di sisi lain, penelitian Puspitawati dan kolega [3] menyimpulkan bahwa model optimalisasi sistem keuangan desa sudah cukup baik dan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, tetapi kompetensi aparatur desa yang masih kurang memadai memberikan dampak negatif. Artikel ini berupaya mengkaji apakah optimalisasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan desa dapat mendukung terciptanya akuntabilitas keuangan yang lebih baik.

Manajemen dana desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan pada setiap entitas, baik pada suatu entitas bisnis demikian juga bagi pemerintahan. Bentuk pertanggungjawaban untuk manajemen dana ditunjukkan melalui akuntabilitas yang berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui akuntabilitas tersebut pemerintah desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintahannya, yang pada akhirnya mampu menjadi pendorong untuk memberikan dukungan terhadap program dan kebijakan yang dijalankan.

Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, dapat dipastikan melalui akuntabilitas yang kuat, sehingga mendukung keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan. Dengan demikian dengan pertanggungjawaban tersebut juga membantu meminimalkan risiko penyimpangan dan memperkuat integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi

walaupun prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ini ditetapkan, namun pengelolaan dana desa ini menghadapi tantangan besar, termasuk kerentanan terhadap kecurangan. Pada tahun 2020, tercatat kerugian negara mencapai miliaran rupiah yang terjadi dari 44 kasus korupsi terkait dana desa [4]. Faktor utama yang memengaruhi hal ini mencakup perencanaan keuangan dan penganggaran yang belum memadai, serta ketidakefisienan dalam sistem pelaporan keuangan. Kekurangan akuntabilitas keuangan menjadi akar dari berbagai masalah ini [5]. Pemerintah desa, sebagai unit pemerintahan yang berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan dan program-program pembangunan.

Pemerintah desa perlu secara serius memperhatikan efisiensi dan keberlanjutan tata kelola keuangan di tingkat desa merupakan hal krusial. Pengelolaan desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik. Proses pengelolaan ini dicerminkan dalam laporan keuangan desa sebagai instrumen penting untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa [6]. Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, memerlukan adanya penguatan sistem pengawasan dan pelaporan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, implementasi teknologi yang dapat mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana desa secara berkelanjutan.

Peningkatan akuntabilitas keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam memperbaiki kinerja keuangan suatu entitas [6]. Akuntabilitas keuangan mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban untuk melaporkan kondisi keuangan secara transparan, jelas, dan akurat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara akuntabel. Prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam menjalankan sebuah organisasi akan tercapai dengan pengelolaan keuangan yang menjadi bagian integral dari tata kelola, yang bertujuan sehingga mempercepat proses pencapaian target-target dari organisasi.

Tata Kelola keuangan di tingkat desa merupakan aspek yang krusial dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan juga pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pedesaan. Desa yang merupakan unit pemerintahan yang terkecil, memikul tanggungjawab besar mengelola keuangannya dengan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sistem Informasi memainkan peran penting sebagai alat yang dapat mengoptimalkan tata keuangan desa, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Percepatan proses pengelolaan keuangan dapat dicapai dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang optimal di tingkat desa, sehingga dapat memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatkan keakuratan pelaporan, serta memperkuat transparansi dan

akuntabilitas keuangan desa. Namun, perangkat desa masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesiapan dalam menjalankan fungsi tata kelola keuangan. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan serta pelaporannya [7].

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi anggaran dana desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa melalui dana transfer daerah dengan mengaktifkan program yang berbasis Desa. Dasar pengalokasian dana ini yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya telah diperbaharui kembali dengan UU nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [8]. ADD adalah salah satu bagian dana perimbangan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota minimal 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Besaran alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa ini maka akan semakin besar pembangunan yang dapat dilaksanakan di desa.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas mengarah kepada konsep di mana organisasi, termasuk pemerintah desa, bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan yang diambil. Penerapan akuntabilitas ini memiliki beberapa aspek yang terbagi ke dalam berbagai tingkatan, salah satunya adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan mengarah pada kewajiban pelaksana untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada pemiliknya, yaitu publik. Sebagai salah satu elemen penting dalam *good governance*, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintahan mampu memenuhi aspirasi masyarakatnya. Prinsip akuntabilitas ini wajib diterapkan oleh individu maupun organisasi di berbagai bidang, termasuk akuntansi dan manajemen. Secara etimologis, istilah akuntabilitas berasal dari kata "accountability," yang berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Dengan demikian, akuntabilitas mencerminkan situasi di mana seseorang atau suatu pihak harus mampu memberikan penjelasan dan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Miriam Budiardjo [9] menggambarkan akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban dari pihak yang diberikan wewenang atau mandat untuk memerintah kepada pihak yang memberikan mandat.

### **Kompetensi Aparatur Desa**

Sumber daya manusia sebagai elemen kunci dalam perubahan memberikan kontribusi positif untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan dalam suatu kelompok atau organisasi. Begitu juga dengan pemerintah daerah, pelaku dari kegiatan pemerintahan ini menjadi faktor strategis untuk menjamin ketercapaian sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*. Pengelolaan sumber daya yang optimal ditandai dengan kompetensi dari sumber daya yang dimaksud, sehingga telaksana sistem pemerintahan sesuai yang direncanakan.

Kecakapan atau kompetensi adalah keahlian atau kapabilitas (ability) seseorang untuk menghandel berbagai pekerjaan, dimana keahlian ini ditentukan oleh dua faktor yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, Stephen Robbin dalam [10]. Keahlian/kecakapan dapat didefinisikan sebagai keterampilan kerja individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan [11]. Untuk menjalankan tugas di bidang pengelolaan keuangan desa dengan baik, diperlukan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki aparatur desa [12]. Kompetensi yang dimaksud diantaranya pertama, pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti qanun/undang-undang desa, peraturan desa dan ketentuan-ketentuan lain [13] Selanjutnya kompetensi atau keahlian akuntansi untuk melakukan pencatatan keuangan desa, keterampilan pengelolaan anggaran yaitu kemampuan menyusun anggaran, monitoring pelaksanaan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan. Di samping hal tersebut aparat desa juga perlu memiliki penguasaan terhadap teknologi informasi seperti perangkat lunak akuntansi seperti sistem informasi keuangan dan sistem informasi pendukung lainnya [11]. Selain hal-hal tersebut, kompetensi untuk komunikasi dan hubungan masyarakat juga diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan baik terkait dengan pengelolaan keuangan desa secara berkala. Dengan menggabungkan kompetensi-kompetensi ini, aparatur desa dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian dari Armelia [12] bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa dengan tidak bekerjanya salah satu aspek pada optimalisasi sistem informasi keuangan, misalnya keamanan dari sistem informasi. Hasil penelitian Puspa [13] bahwa ketrampilan pengelola keuangan untuk dana desa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti keterampilan Kepala Desa dan Bendahara Desa memengaruhi secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Manajemen dana desa melibatkan beberapa aspek yang penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut secara efektif, transparan, dan akuntabel. Beberapa hal yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan dana desa antara lain [14]:

1. Perencanaan Anggaran; hal yang perlu dipertimbangkan adalah penyusunan rencana anggaran yang jelas dan terperinci, kebutuhan desa diidentifikasi dengan prioritas, dan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan anggaran tersebut
2. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Pertemuan desa diselenggarakan untuk memperoleh masukan dan partisipasi masyarakat, untuk transparansi pengelola

melakukan publikasi anggaran dan laporan keuangan secara terbuka.

3. Administrasi Keuangan: menyelenggarakan pembukuan yang rapi dan akurat, yang diselenggarakan dengan sistem administrasi keuangan desa. Untuk meminimalisir potensi penyelewengan diperlukan pemisahan tugas.
4. Pemantauan dan Evaluasi: melakukan mekanisme pemantauan untuk pelaksanaan program dan penggunaan dana. Selanjutnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan efektifitas pengelolaan dana.
5. Kepatuhan Hukum: Pengelolaan dana desa dipastikan mematuhi peraturan atau dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Kemudian diperlukan pemahaman yang baik tentang regulasi keuangan pemerintah.
6. Pengawasan Internal: Hal yang tidak kalah penting adalah adanya pengawasan internal yang efektif, adanya pemeriksaan internal yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi.
7. Pelaporan: Penyusunan laporan keuangan secara berkala dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa.
8. Kapasitas Sumber Daya Manusia: Dilakukannya pelatihan bagi petugas desa terkait pengelolaan keuangan dan administrasi, sehingga meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia terkait pengelolaan dana desa.
9. Penggunaan Teknologi: Peran teknologi informasi sangat mendukung administrasi keuangan dan juga pelaporan pengelolaan dana desa.
10. Pengendalian Risiko: Pengelola dana harus mengidentifikasi risiko potensial yang akan dihadapi berkaitan dengan pengelolaan tersebut dan memastikan perlindungan terhadap potensi penyelewengan atau kecurangan.

### **Sistem Informasi Keuangan**

Siskeudes merupakan singkatan sistem keuangan desa yang merupakan sistem informasi akuntansi. sistem ini dikembangkan untuk kepentingan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengelolaan dana desa merupakan penerapan atau implementasi dari sistem informasi akuntansi untuk program dana desa. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, Romney & Steinbart dalam [3]. Dengan pendapat tersebut maka sistem informasi akuntansi dimaksudkan sebagai

suatu rangkaian prosedur dari proses kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain yang dimulai dari proses mengumpulkan data yang akan disimpan untuk diproses lebih lanjut sehingga menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

### Optimalisasi Sistem Informasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang diartikan sebagai suatu proses yang menggambarkan bagaimana menemukan sesuatu solusi yang terbaik dari berbagai pilihan solusi [15]. Optimalisasi sistem merujuk pada proses meningkatkan kinerja atau efisiensi suatu sistem agar mencapai hasil terbaik. Sistem dapat mencakup berbagai hal, seperti sistem komputer, jaringan, produksi, manajemen, atau proses bisnis. Tujuan optimalisasi sistem adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dimanfaatkan seefisien mungkin sehingga dapat mencapai kinerja maksimal atau hasil yang diinginkan. [10]. Beberapa aspek yang sering diperhatikan dalam optimalisasi sistem melibatkan penggunaan sumber daya seperti waktu, energi, uang, atau perangkat keras dan perangkat lunak. Proses optimalisasi mungkin melibatkan analisis, perancangan ulang, penyesuaian, atau implementasi teknologi baru untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Optimalisasi sistem seringkali diterapkan dalam berbagai bidang, salah satunya termasuk teknologi informasi, dengan melakukan optimalisasi sistem, organisasi atau individu dapat menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Optimalisasi sistem informasi keuangan desa melibatkan beberapa langkah strategis agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif yang melibatkan studi kasus. Melalui desain ini peneliti mendapatkan pemahaman tentang optimalisasi sistem informasi keuangan dan kompetensi aparatur desa dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Blang Mangat. Objek penelitian Aparatur desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, operator desa, Kaur pembangunan dan ketua dusun/RT.

Populasi adalah desa-desa di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, yang berjumlah 22 desa. Populasi desa tersebut akan dipilih secara random 6 orang yang mewakili desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, operator desa, Kaur pembangunan dan ketua dusun/RT yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa Berikut adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Blang Mangat pada tabel dibawah ini.

Adapun desa yang dipilih untuk mewakili objek adalah seluruh desa di Kecamatan Blang Mangat dengan kategori telah melaporkan dana desa pada tahun 2023. Dengan kategori tersebut maka objek penelitian ini dapat disebut dengan penelitian populasi karena data yang diperoleh

bahwa desa-desa di Kecamatan Blang Mangat telah melakukan realisasi dana desa pada tahun 2023.

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala Likert. Berdasarkan jumlah kuesioner yang disebarkan kepada 132 responden, dari jumlah kuesioner tersebut jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan secara sempurna adalah 85 kuesioner. Namun hanya 75 yang dapat digunakan sebagai data untuk dilakukan pengujian. Pengurangan ini dilakukan untuk menyaring data yang memenuhi kualitas data penelitian berdasarkan jawaban yang diberikan responden.

Operasional variabel penelitian yang digunakan adalah:

Variabel Bebas

1. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan yaitu Optimalisasi sistem merujuk pada proses meningkatkan kinerja atau efisiensi suatu sistem agar mencapai hasil terbaik.
2. Kompetensi Aparatur Desa: Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Variabel Terikat

Akuntabilitas Keuangan: Akuntabilitas keuangan adalah Sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh pihak sebagai agen untuk menyampaikan pelaporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Keuangan  
X<sub>1</sub>: Optimasilisasi Sistem Informasi keuangan  
X<sub>2</sub>: Kompetensi Aparatur Desa  
 $\alpha$  : Konstanta  
b : Koefisian regresi  
e : Error term

### Uji Instrumen

Pengujian alat dilakukan agar mendapatkan hasil penelitian yang valid, maka dibutuhkan pengujian terhadap alat yang akan digunakan.

### Uji validasi

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji data yang terjadi pada objek dengan data yang dapat diperoleh peneliti [22]. Uji signifikansi diperoleh dari hasil perbandingan nilai r hitung dengan r tabel dengan taraf alpha 5 %. Jika r hitung lebih besar dari r

tabel dan nilainya positif maka item dinyatakan valid, sedangkan jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel dan nilainya negatif maka item dinyatakan tidak valid.

#### Uji reabilitas

Alat yang reliabel adalah alat yang dapat dipakai berulang kali untuk mengukur objek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama. Uji reabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai instrumen penelitian merupakan indikator variabel yang konstruk. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika tanggapan seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas ini diuji dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Kriteria pengujian reliabilitas yaitu:

- Jika koefisien  $> 0,60$  maka instrumen yang digunakan reliabel
- Jika koefisien  $< 0,60$  maka instrumen yang digunakan tidak reliabel

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik serangkaian tes yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu model regresi linier memenuhi asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan regresi linear dengan pendekatan ordinary Least Square atau OLS terdiri dari beberapa uji yaitu uji normalitas, linearitas, uji Multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas Sulistio Basuki (2015 dalam [23]). Berikut adalah beberapa asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear, untuk variabel dependen dan independen keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil dari uji ini menjadi prasyarat untuk dapat melakukan proses pengujian kelayakan data untuk dianalisis. uji normalitas diuji dengan Kolmogorov-Smirnov. Suatu data dikatakan memenuhi syarat normalitas dengan nilai Asymp. Sig (1 atau 2 Tailed)  $< \alpha$ , atau dengan membandingkan nilai probabilitas dengan  $\alpha$  dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila P-Value  $> \alpha$  (0,05) maka terdapat penyebaran data secara normal;
- Bila P-Value  $< \alpha$  (0,05) maka terdapat penyebaran data secara tidak normal;

#### Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi korelasi antara variabel independen dalam model yang digunakan. Apabila tidak terdapat multikolinearitas maka model regresi dapat digunakan lebih lanjut untuk penelitian. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas digunakan *tolerance value* (1/VIF) dan *variance inflation factor* (VIF). Kriteria keputusan sebagai berikut:

- Bila *tolerance value*  $> 0,1$  dan  $VIF < 10$ , maka tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen (bebas) dalam model yang digunakan.
- Bila *tolerance value*  $< 0,1$  dan  $VIF > 10$ , maka terdapat multikolinearitas antara variabel independen (bebas) dalam model yang digunakan.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah model yang digunakan terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas ini dalam model regresi yang digunakan adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien baik untuk sampel kecil maupun sampel besar. Kriteria keputusan apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model dengan Uji Glejser yang membandingkan *nilai sig.* dengan *alpha*. Bila *nilai sig.*  $> \alpha$  maka model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas, sebaliknya bila *nilai sig.*  $< \alpha$  maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas

#### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan pengujian yang dilakukan terhadap pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan yang diteliti, untuk mengetahui apakah variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan secara terpisah (parsial) antar variabel dependen dengan variabel independen, ataupun dilakukan secara bersamaan (simultan) antar variabel dependen dengan variabel independen. Hipotesis penelitian ini adalah:

- $H_{01}$  diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa
- $H_{a1}$  diduga secara parsial terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa
- $H_{02}$  diduga secara simultan tidak terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa
- $H_{a2}$  diduga secara simultan terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melakukan uji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Uji t) dan secara simultan melalui Uji F.

#### Uji T

Variabel-variabel penelitian tersebut diatas dilakukan uji hipotesis statistik secara parsial (uji t). Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi pada tabel. Kriteria dari uji statistik t dengan taraf signifikansi 5 % ( $\alpha = 0,05$ ) :

1. Jika nilai signifikansi uji  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika nilai signifikansi uji  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Dengan demikian maka hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Jika nilai signifikansi uji  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan alpha 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yaitu tidak terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa.
2. Jika nilai signifikansi uji  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan alpha 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa.

#### Uji F

Uji F dilakukan untuk menentukan pengaruh keseluruhan dari variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Pengujian uji F untuk taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), jika nilai signifikan f lebih kecil dari 0,05 ( $F < 0,05$ ) maka dapat diartikan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini yaitu dapat diterima atau ditolak dengan syarat

- a. bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa
- b. bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  di terima, artinya secara simultan terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa

#### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur besaran kemampuan variabel bebas menerangkan/mempengaruhi variabel terikat. Nilai determinasi ( $R^2$ ) mendekati nilai 0

- 1. Nilai R mendekati 0 maka variabel bebas menerangkan variabel terikat sangat terbatas, jika mendekati 1 maka diartikan bahwa keberadaan variabel bebas sangat kuat

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

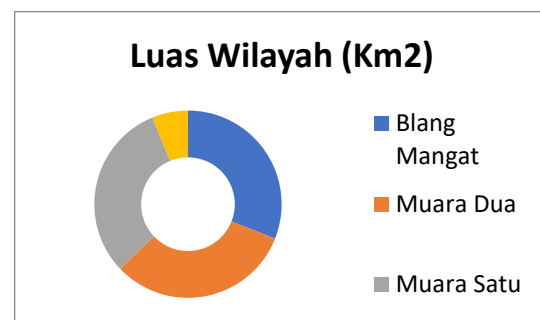
Kecamatan Blang Mangat adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kecamatan ini dikukuhkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1986 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 14 Agustus 1986 no. 48 Tentang Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe. Kecamatan ini sebelumnya merupakan kecamatan di wilayah kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Blang Mangat diresmikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah TK-II Aceh Utara atas nama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, pada masa itu tanggal 19 Juli 1988. Pada tahun 2001 dengan kepemimpinan Negara Presiden Republik Indonesia Bapak H. Abdurrahman Wahid (Almarhum), dilakukan perkembangan daerah, yang kemudian lahir Undang-undang nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe pada tanggal 21 Juli 2001. Berdasarkan perkembangan kota tersebut maka Kota Lhokseumawe terdapat 4 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Blang Mangat ini termasuk ke Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan luas wilayah di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Blang Mangat merupakan kecamatan urutan kedua lebih luas setelah Kecamatan Muara Dua, dapat diperhatikan dari bentuk tabel dan grafis berikut ini:

Tabel 1 Geografis dan Demografis Kecamatan Kota Lhokseumawe

Kcamatan	Luas Wilayah (KKem2)	Populasi Penduduk (jiwa) (2023)	Jumlah Desa
Blang Mangat	56.12	28.146	22
Muara Dua	57.80	53.068	17
Muara Satu	55.90	35.003	11
Banda Sakti	11.24	79.850	18

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe (2024)



Gambar 1. Luas wilayah Kecamatan di Kota Lhokseumawe.

Akan tetapi walaupun Kecamatan Blang Mangat menduduki urutan kedua dalam luas wilayah namun bila diperhatikan dari jumlah populasi penduduk, kecamatan ini (Blang Mangat) memiliki populasi yang paling sedikit atau urutan ke 4 dari 4 kecamatan yang berada di Kota

Lhokseumawe, yang digambarkan pada gambar 2. Sebaran populasi tersebut berada di sejumlah desa, berdasarkan jumlah desa Kecamatan Blang Mangat ini merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak yaitu 22 desa dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya (gambar 4.3). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Kecamatan Blang Mangat yang memiliki jumlah desa yang lebih banyak dari pada kecamatan yang lain di Kota Lhokseumawe namun memiliki kepadatan penduduk yang lebih sedikit dibandingkan tiga kecamatan yang lainnya. Hasil ini memberikan gambaran bahwa penduduk yang berada di desa-desa tersebut dihuni oleh jumlah KK yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kota Lhokseumawe.

**Statistik Deskriptif**

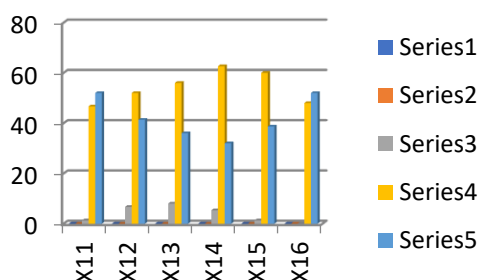
**Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Desa (X1)**

Variabel Optimalisasi sistem informasi keuangan desa (X1) yang menggunakan 6 butir pernyataan, masing-masing mendapatkan skor yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 2. Populasi Penduduk menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe

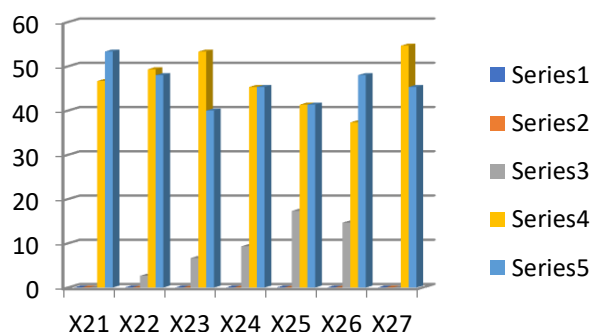
Untuk pernyataan sistem informasi keuangan desa digunakan untuk melaporkan keuangan desa sebanyak 39 atau 52 persen responden menyatakan sangat setuju. Untuk pernyataan kedua tentang kontribusi sistem informasi keuangan desa dalam meningkatkan transparansi keuangan 39 atau 52 persen responden memberikan pendapat berkontribusi. Selanjutnya untuk pernyataan ketiga mengenai kemudahan penggunaan sistem informasi keuangan desa sebanyak 42 responden atau 56 persen menyatakan bahwa sistem informasi keuangan desa mudah untuk digunakan.



Gambar 3. Respon yang diberikan untuk Optimalisasi sistem Informasi Keuangan

**Kompetensi Aparatur Desa (X2)**

Berdasarkan hasil rekapitulasi data untuk variabel Kompetensi Aparatur desa (X2) yang menggunakan 7 butir pernyataan, masing-masing mendapatkan skor yang disajikan pada Grafik dan Tabel IV.2. Untuk pernyataan Pengetahuan aparatur desa mengenai akuntansi dan keuangan sebanyak 40 atau 53,33 persen responden menyatakan sangat memadai. Untuk pernyataan kedua Aparatur desa mengikuti pelatihan keuangan 37 atau 49,33 persen responden memberikan pendapat sering mengikuti pelatihan keuangan. Selanjutnya untuk pernyataan ketiga mengenai Pelatihan diberikan dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa sebanyak 40 responden atau 53,33 persen menyatakan bahwa aparatur desa sering mendapatkan pelatihan tentang keuangan desa. Untuk pernyataan keempat tentang Kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan responden memberikan tanggapan bahwa 34 orang atau 45,33 persen mampu dan sangat mampu. Kemudian untuk pernyataan Aparatur desa memiliki kompetensi cukup memadai untuk menyiapkan laporan keuangan desa responden memberikan tanggapan dengan jumlah yang sama 31 tanggapan setuju dan sangat setuju atau 41,33 persen. Kemudian untuk pernyataan Aparatur desa memiliki kompetensi cukup memadai untuk Teknologi Informasi (IT) responden memberikan tanggapan 36 tanggapan sangat setuju atau 48 persen. Yang terakhir untuk pernyataan bahwa Kompetensi Aparatur desa untuk menyusun anggaran tahunan memperoleh tanggapan 41 responden setuju atau 54,67 persen. Berdasarkan hasil tersebut maka pernyataan bahwa pengetahuan atau kompetensi aparatur desa sangat dibutuhkan untuk melakukan perencanaan terhadap anggaran dan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan (akuntabilitas keuangan) di desa. Tanggapan responden disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini.

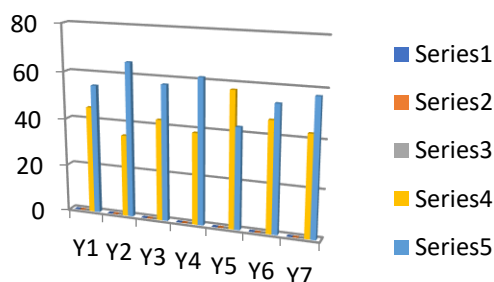


Gambar 4. Respon yang diberikan untuk Kompetensi Aparatur desa (X2)

**Akuntabilitas Keuangan (Y)**

Berdasarkan hasil rekapitulasi data untuk variabel Akuntabilitas Keuangan (Y) yang menggunakan 8 butir

pernyataan, masing-masing mendapatkan skor yang disajikan pada Grafik dan Tabel IV.3. Untuk pernyataan Sistem keuangan desa sudah transparan memperoleh tanggapan sebanyak 41 sangat transparan atau sangat setuju atau 54,67 persen. Untuk pernyataan kedua Seberapa sering laporan keuangan desa diumumkan kepada masyarakat mendapat tanggapan 49 atau 65,33 persen responden memberikan pendapat laporan keuangan sangat sering diumumkan, hal ini dapat dipantau melalui papan informasi di setiap desa untuk pengelolaan dana di desa. Selanjutnya untuk pernyataan ketiga mengenai Penilaian Anda terhadap keakuratan laporan keuangan desa mendapat tanggapan sebanyak 43 responden atau 57,33 persen menyatakan bahwa laporan keuangan desa telah disajikan secara akurat. Untuk pernyataan keempat tentang Seberapa transparan Anda menilai laporan keuangan desa responden memberikan tanggapan bahwa 46 orang atau 61,33 persen bahwa laporan keuangan desa telah disajikan dengan transparan, hal ini didukung dengan adanya papan informasi yang telah dijelaskan pada pernyataan nomor dua. Kemudian untuk pernyataan Laporan keuangan desa mudah dipahami oleh masyarakat responden memberikan tanggapan dengan jumlah 43 tanggapan atau 57,33 persen laporan keuangan mudah dipahami oleh masyarakat desa. Kemudian untuk pernyataan Laporan keuangan desa dilaporkan secara rutin setiap tahun anggaran responden memberikan tanggapan 40 tanggapan sangat rutin atau 53,33 persen. Untuk pernyataan Laporan keuangan desa sesuai kegiatan pelaksanaan anggaran yang sah responden memberikan tanggapan 43 sangat sesuai atau 57,33 persen. Yang terakhir untuk pernyataan bahwa Kinerja keuangan desa melibatkan unsur-unsur pengelola keuangan desa memperoleh tanggapan 42 responden setuju atau 56 persen telah melibatkan unsur-unsur pengelola keuangan desa. Berdasarkan hasil tersebut maka pernyataan bahwa akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Blang Mangat secara umum telah dilaksanakan. Tanggapan responden disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini.



Gambar 4. Respon yang diberikan untuk Akuntabilitas Keuangan (Y)

#### Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil olahan data untuk uji instrumen diperoleh hasil uji validitas untuk item yang digunakan, untuk variabel X1 terdapat 6 item, untuk variabel X2 terdapat 7 item, dan untuk variabel Y terdapat 8 item,

berdasarkan hasil pengujian validitas, kuesioner dinyatakan valid untuk digunakan.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Hasil uji normalitas yang diuji dengan Kolmogorov-Smirnov, telah memenuhi syarat normalitas dengan nilai Asymp. Sig 2-Tailed < 0.001, dengan demikian data terdistribusi secara normal dalam penelitian ini.

##### Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi korelasi antara variabel independen dalam model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, maka model regresi dapat digunakan lebih lanjut. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai *tolerance value* > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen (bebas) dalam model yang digunakan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh 0,378 > 0,1 dan 2,647 < 10 untuk X1 dan X2, maka dengan demikian dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas

##### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah model yang digunakan terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas ini dalam model regresi yang digunakan adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien baik untuk sampel kecil maupun sampel besar. Kriteria keputusan apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model dengan menggunakan Uji Glejser, dengan membandingkan nilai signifikansi dengan alpha. Kriteria pengambilan keputusan bila nilai sig. lebih besar dari alpha (>0.05) maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya nilai sig. lebih kecil dari alpha (<0.05) maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai sig untuk variabel X1 dan X2 masing-masing lebih besar dari nilai alpha (0,263 dan 0,256 > 0,05) maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

#### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan pengujian yang dilakukan terhadap pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan yang diteliti, untuk mengetahui apakah variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan secara terpisah (parsial) antar variabel dependen dengan variabel independen, ataupun dilakukan secara bersamaan (simultan) antar variabel dependen dengan variabel independen. Hipotesis penelitian ini adalah:

##### Uji T

Variabel-variabel penelitian tersebut diatas dilakukan uji hipotesis statistik secara parsial (uji t). Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi pada tabel. Kriteria dari uji statistik t dengan taraf signifikansi 5 % ( $\alpha = 0,05$ ) diperoleh nilai signifikansi uji t  $0,001 < 0,05$  (gambar 4.10) maka tidak menerima  $H_0$  dan berdasarkan bukti yang diperoleh mendukung  $H_a$ . Hal ini memberikan arti bahwa ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa.

### Uji F

Uji F dilakukan untuk menentukan pengaruh keseluruhan dari variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Pengujian uji F untuk taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), jika nilai signifikan f lebih kecil dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) (gambar 4.10) maka dapat diartikan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan hal tersebut maka untuk hipotesis penelitian diterima bahwa secara simultan terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi sistem informasi keuangan desa dan kompetensi aparatur desa.

### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur besaran kemampuan variabel bebas menerangkan/mempengaruhi variabel terikat. Nilai R Square 0,890 maka variabel bebas menerangkan variabel terikat sangat kuat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel Optimalisasi Sistem Keuangan Desa ( $X_1$ ) dan Kompetensi Aparatur Desa ( $X_2$ ) mampu mempengaruhi variabel Akuntabilitas Keuangan ( $Y$ ) sebesar 89 persen atau 0,89.

Desa dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Keberadaan desa dengan ciri homogen dalam mata pencaharian misalnya sebagai petani, nelayan, pekebun dan lainnya [24]. Keberhasilan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari bagaimana peran dari pembangunan di tingkat desa [25]. Pemerintah memprioritaskan pelaksanaan pembangunan dengan mengucurkan program dana desa melalui transfer fiskal ke APBD kabupaten/kota. Dana desa merupakan wujud pemerataan pembangunan di desa terutama desa dengan kategori desa tertinggal. Pengelolaan dana desa diselenggarakan oleh aparat desa ditingkat pemerintahan desa, penyelenggaraan ini menuntut adanya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana. Proses penyelenggaraan didukung dengan sistem keuangan desa dan kecakapan dari pelaksana (aparatur desa).

### Pengaruh Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Keuangan ( $Y$ )

Akuntabilitas mengandung arti seberapa besar kegiatan organisasi publik dalam hal ini desa tunduk pada aparat desa yang telah dipilih oleh rakyat, dengan asumsi bahwa kepala desa merupakan penanggungjawab dari pelaksana kegiatan desa dengan sendirinya merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap organisasi pemerintahan, dikarenakan akuntabilitas yang di dalamnya mencakup tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan/pelayan publik, terutama sekali yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa optimalisasi sistem informasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan yang bermakna bahwa sistem informasi keuangan desa yang dilakukan dengan baik dan tepat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik. Hal ini didukung dengan penelitian [25] bahwa dalam aspek pelaporan keuangan desa akuntabilitas dapat diwujudkan bila terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap laporan keuangan desa. Variabel Kompetensi aparatur desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas, yang bermakna bahwa pelaksanaan atau pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan baik dan kompeten, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan didukung dengan pendekatan teori, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel optimalisasi sistem informasi keuangan desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas, yang bermakna bahwa sistem informasi keuangan desa yang dilakukan dengan baik dan tepat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik. Untuk variabel Kompetensi aparatur desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas, yang bermakna bahwa pelaksanaan atau pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan baik dan kompeten, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik.

### REFERENSI

- [1] Rahmadani, Lili, "Alokasi Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Sumatera Barat," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 5, pp. 34-42, Maret 2023.
- [2] Sari, N., Mutmainna, M., & Rusli, A., "Optimalisasi Peran Sistem Informasi Akuntansi Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan (Kecamatan Larompong Selatan)", *Economics and Digital Business Review*, vol. 1, pp245-252, 2024.

- [3] Puspitawati, L., Amanda, Surtikanti, “Model Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 2, pp. 321-332, 2023
- [4] Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten,,” *Jurnal Akuntansi Trisakti*, vol. 2, pp 323-340, September 2022.
- [5] Basri, H, & Nabihah, A.S, “Accountability of local government: The case of Aceh Province, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, vol. 1, pp1-14, Desember 2014.
- [6] Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A, “Sistem akuntansi pengelolaan dana desa”, *Jurnal ekonomi dan bisnis*, vol. 2, pp. 323-340, 2016.
- [7] (2024) peraturan bpk [online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/>
- [8] Asy'ari, M. Y. Z., Rabbani, S. R., Leonardi, S., & Izzalqurny, T. R, “Perbandingan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Dan Mushola”, In *Proc National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Paper, Desember 2022
- [9] Setiadiputra, R. Y. P, “Urgensi program pengembangan kompetensi sdm secara Berkesinambungan di lingkungan instansi pemerintah”, *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, vol. 1, pp. 16-22, 2017.
- [10] Satria, S. P., Zakaria, Z., Pasolo, F., Noch, M. Y., & Suratini, S, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Keerom”, *SEIKO: Journal of Management & Business*, vol.1), pp. 30-52, 2024
- [11] Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesityy terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 2, pp. 61-70, 2020
- [12] Puspa, D F., & Riky Agung Prasetyo, “Pengaruh Kompetensi Pemerintah desa, Sistem Pengendalian internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, vol. 2, pp. 281-298, 2020.
- [13] Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H, “Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito.”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 3, 95-111. 2023.
- [14] Athoillah, M., & Putri, R. K, *Sistem Informasi Manajemen*. CV Pena Persada, 2023.
- [15] Hidayat, Asep & Irvanda, “Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance”, *Hospitality*, vol. 1, pp. 281-290, Juni 2022